

EFEKTIFITAS PEMANFAATAN KARTU NELAYAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN NELAYAN TRADISIONAL DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG

Suhari Yanto ¹, Fitri Eriyanti ²

¹) Jurusan Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

²) Jurusan Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, 25132

INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 23 Januari 2019

Direvisi: 27 Januari 2019

Diterbitkan: Februari 2019

KATA KUNCI

Pemanfaatan , Kartu Nelayan,
Pemberdayaan

KORESPONDEN

No. Telepon: 081266160247

E-mail:

suhariyanto4895@gmail.com

fitri.eriyaniti@fis.unp.ac.id

A B S T R A K

Sebagai negara Kepulauan, Indonesia masih mempunyai permasalahan dengan kehidupan nelayan. Nelayan dan masyarakat pesisir telah lama terabaikan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan. Dalam pelaksanaannya nelayan masih belum paham mengenai pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang menggambarkan latar pengamatan, tindakan, orang dan pembicaraan yang diperoleh di lapangan. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Informan penelitiannya sebanyak 13 orang. Teknik pengumpulan data meliputi : Observasi, interview (wawancara), dan studi dokumentasi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini instrument utama penelitian dibantu dengan pedoman wawancara dan panduan observasi. Untuk menganalisis data penelitian, peneliti mengelola, mencari dan di urutkan dan diorganisasikan dalam kategori atau pokok-pokok bahasan kemudian selanjutnya diusulkan dan diuraikan sedemikian rupa setelah itu dikaitkan dengan teori yang ada. Teknis keabsahan data dalam penelitian ini melalui Ketekunan pengamat dan triangulasi metode. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemanfaatan dari pemberian kartu nelayan belum efektif.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 17.508 pulau

besar dan kecil, memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, dan luas kawasan laut 3,1 juta km² (tidak termasuk luas laut Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE). Potensi laut yang besar memiliki

perbedaan yang kentara dengan kondisi kehidupan nelayan, antara lain rumah-rumah nelayan yang sederhana yang berlokasi di bibir pantai, di tambah lagi dengan pencemaran sampah dan limbah dari rumah tangga maupun pabrik yang bermuara di pantai.

Nelayan dan masyarakat pesisir telah lama terabaikan di Indonesia. Kebijakan pembangunan di sektor perikanan pada masa Orde Baru dijalankan secara *top-down*, dan relatif tidak berpihak pada nelayan tradisional. Akibatnya nelayan kecil atau nelayan tradisional sering tidak mendapatkan perlindungan. Kemampuan nelayan tradisional dalam usaha pekanan masih terbatas baik karena tak memiliki modal maupun alat tangkap yang memadai.

Guna mengatasi permasalahan nelayan yang begitu kompleks sejak April 2016 diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan. Yang dimaksud dengan kartu nelayan adalah kartu identitas dalam melakukan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan (pasal 1 No.16/PERMEN-KP/2016). Dalam Peraturan Menteri No.16/PERMEN-KP/2016 pada BAB V tentang persyaratan dan tata cara penerbitan kartu nelayan bagian kesatu pasal 8 (ayat 1) yaitu: Setiap nelayan untuk memiliki kartu nelayan harus mengajukan permohonan kepada dinas kabupaten/kota sesuai dengan domisili dengan melampirkan persyaratan. (a) Formulir permohonan penerbitan kartu nelayan yang telah di isi, (b) Foto kopi KTP, (c) Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkerja sebagai nelayan, dan (d) Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Dijelaskan pada BAB II Pasal 3 (ayat 2) Permen KP No.16/PERMEN-KP/2016 tentang fungsi kartu nelayan yaitu: (a) Identitas profesi nelayan, (b) Basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, (c) Memberikan kemudahan dalam pembinaan

nelayan, dan (d) Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program kementerian.

Keuntungan memiliki kartu nelayan bagi nelayan itu sendiri antara lain :

1. Memudahkan nelayan untuk mendapatkan bahan bakar. Dari hasil wawancara dengan bapak Al pegawai BBM Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Kota Padang yang menjelaskan mengenai keberadaan dari SPDN tersebut dikhususkan hanya untuk nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo, agar masyarakat tidak bersusah payah mengantri di SPBU. Dalam pembelian bahan bakar di SPDN tersebut tidak harus menggunakan kartu nelayan, tetapi menggunakan surat pengantar dari kelompok nelayan tersebut, namun apabila pembelian bahan bakar dilakukan di SPBU pada umumnya maka harus menunjukkan kartu nelayan, SPDN tersebut hanya mempunyai 80 ton minyak saja, apabila minyak di SPDN sudah habis maka para nelayan harus membeli minyak ke SPBU.
2. Mendapatkan asuransi. Untuk mendaftar menjadi peserta asuransi Jamkesmas ataupun Jamsostek seorang nelayan harus memenuhi ketentuan : memiliki kartu nelayan, berusia maksimal 65 tahun, menggunakan kapal berukuran paling besar 10 GT, tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah.
3. Program Mina Usaha Pedesaan (PUMN) yang ditujukan kepada masyarakat nelayan yang sudah terbentuk dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk terus berkembang dan menumbuhkan kewirausahaan dan mengajukan program bantuan berupa alat tangkap dan bantuan keperluan nelayan, dalam hal ini KUB di Kelurahan Koto Nan Tigo sudah mengajukan permohonan kepada DKP mengenai alat tangkap dan sudah mendapatkan bantuan tersebut, dalam pengajuan program bantuan tersebut harus mencantumkan nama kelompok serta nama

- keseluruhan anggota dan melampirkan kartu nelayan.
4. Selanjutnya adalah kepengurusan sertifikat tanah secara gratis yang diprogramkan untuk masyarakat nelayan yang dilakukan oleh kementerian ART/BPN berkerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan keputusan bersama Nomor 04/MEN-KP/KB/XI/2017 dan Nomor 7-SKB-BPNRI-2017 tanggal 15 November 2007 yang tujuannya untuk memberikan fasilitasi akses penguatan hah berupa sertifikasi tanah kepada nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil.
 5. Program bimbingan teknis penangkapan ikan adalah salah satu program pemerintah untuk melatih para nelayan dalam pembinaan menuju nelayan yang baik, guna memberi pengetahuan proses penangkapan ikan agar kelestarian ikan tetap terjaga dan nelayan tetap bisa mencari ikan, dari keberadaan program tersebut diharapkan merubah pola pikir masyarakat nelayan yang tradisional ke tradisional yang lebih baik lagi.
 6. Mendapatkan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditujukan untuk masyarakat nelayan yang tidak bisa melaut dikarenakan cuaca buruk yang terjadi berkepanjangan yang menyebabkan masyarakat nelayan tidak bisa melaut, dan program tersebut ditujukan kepada nelayan yang memiliki kartu nelayan sebagai bukti tepat sasaran kepada nelayan.

Terkait kegunaan atau kemanfaatan kartu nelayan beberapa nelayan yang telah peneliti wawancarai mengatakan bahwa mereka belum tahu nilai lebih kegunaan dari kartu nelayan tersebut. Mereka belum bisa memanfaatkan kartu nelayan itu sesuai kegunaan atau manfaat kartu nelayan diterbitkan seperti untuk membeli BBM bersubsidi, dan untuk mengajukan permohonan mendapatkan bantuan alat tangkap dari pemerintah.

Dalam permasalahan mengenai kepemilikan kartu nelayan ini DKP Kota Padang mempunyai kendala dalam melakukan sosialisasi mengenai kartu nelayan tersebut. Hal itu disebabkan karena masyarakat nelayan yang selalu sibuk melaut untuk mencari ikan sehingga yang menghadiri pertemuan yang dilakukan oleh DKP untuk sosialisasi tentang kartu nelayan tidak banyak yang hadir. Akibatnya hal tersebut menyebabkan masih kurangnya pemahaman nelayan tentang pentingnya memiliki dan memanfaatkan kartu nelayan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Efektivitas pemanfaatan kartu nelayan dalam pemberdayaan nelayan tradisional di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang menggambarkan latar pengamatan, tindakan, orang dan pembicaraan yang diperoleh di lapangan. Penggunaan metode ini akan memberikan peluang bagi peneliti untuk mengumpulkan data yang bersumber dari observasi, wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi guna menggambarkan subjek penelitian. Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitiannya sebanyak 13 orang yang terdiri dari Kepala UPTD DKP Kota Padang, Ketua KUB, Pengawas SPDN, Pegawai Asuransi, Pegawai Bank, dan Nelayan.

Tekni pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Observasi, interview (wawancara), dan studi dokumentasi. Peneliti menggunakan pedoman pertanyaan yang sesuai dengan situasi lapangan dengan tetap memperhatikan permasalahan-permasalahan penelitian terkait mengenai efektivitas pemberdayaan nelayan tradisional melalui pemberian kartu nelayan. Alat pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini instrument utama penelitian dibantu dengan pedoman wawancara dan panduan observasi yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian dibantu dengan alat pengumpulan data lainnya berupa handphone dan kamera yang digunakan untuk merekam proses wawancara dengan informan penelitian dan catatan lapangan yang berisi data-data peneliti selama observasi.

Untuk menganalisis data penelitian, peneliti mengelola, mencari dan di urutkan dan diorganisasikan dalam kategori atau pokok-pokok bahasan kemudian selanjutnya diusulkan dan diuraikan sedemikian rupa setelah itu dikaitkan dengan teori yang ada. Teknis keabsahan data dalam penelitian ini melalui Ketekunan pengamat dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pendidikan Nelayan

Tingkat pendidikan di Kecamatan Koto Tengah masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD / Tidak tamat SD	151,2	21 %
SMP / Tidak tamat SMP	280,8	39 %
SMA / Tidak tamat SMA	201,6	28 %
Diploma	21,6	3 %
Sarjana	68,8	9 %
Jumlah	724	100%

Sumber: Data dari Kantor Camat Kecamatan Koto Tengah tahun 2017

2. Kelompok Nelayan

Berikut ini adalah data kelompok-kelompok masyarakat nelayan yang terdapat di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;

- Daftar kelompok Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan yang

terregistrasi pada tahun 2017 dan 2018 di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang adalah sebanyak 32 kelompok.

- Daftar kelompok Kelompok Pengusaha dan Hasil Pemasaran (POKLAHSAR) yang terregistrasi pada tahun 2017 dan 2018 di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang adalah 25 kelompok.
- Daftar kelompok Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang terregistrasi pada tahun 2017 dan 2018 di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang adalah 34 kelompok.

3. Efektivitas pemanfaatan kartu nelayan dalam pemberdayaan nelayan tradisional di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

Berdasarkan temuan penelitian dan mengacu kepada teori efektivitas yang dikemukakan oleh Subagyo dan Mubyanto (2000:55), maka efektivitas pemanfaatan kartu nelayan di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang sebagai berikut:

a. Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran merupakan acuan dalam sebuah program. Apabila program tersebut tidak tepat sasaran maka permasalahan tersebut akan tetap berjalan. Dalam kaitannya dengan ketepatan sasaran program penerima kartu nelayan di kecamatan koto tengah, jumlah kartu nelayan telah diterima data yang masuk dalam pendataan asuransi pada tahun 2016 yaitu 216 jiwa, dan di tahun 2017 meningkat 347 jiwa menjadi 563. Dalam pendataan ketepatan sasaran program kartu nelayan sudah tepat sasaran dikarenakan kebijakan program kartu nelayan hanya ditujukan bagi masyarakat nelayan, melaiikan untuk merubah tingkat efektivitas dari keberhasilan program kartu nelayan diukur dari tingkat efektivitas itu sendiri.

Adapun ketepatan sasaran program dalam penelitian Kurniawati, Supriyono, Hanafi dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto”, yang meliputi program bantuan yang diberikan oleh pihak BPM Kota Mojokerto tahun 2011, bentuk programnya antara lain : program bantuan perorangan, bantuan tenda, bantuan mesin jahit, bantuan gerobak, dan pelatihan olahan jamur tiram. Dapat diketahui bahwa program yang diberikan oleh BPM telah berjalan dengan baik dan tepat sasaran dengan melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat miskin yang ada untuk diberikan bantuan dan binaan terkait dengan program yang ada.

Selanjutnya penelitian oleh Muslim yang berjudul “Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (studi kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa timur)”. Proses menunjukkan kegagalan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini diakibatkan karena proses perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD). Tidak sesuai dengan prosedur LPMD berembuk menyusun perencanaan tanpa dihadiri oleh fasilitator, hal itulah yang menjadi gagalnya program pemberdayaan masyarakat.

Dari contoh penelitian oleh muslim di atas terlihat bahwa suatu program yang disusun secara bersama2 oleh masyarakat melalui lembaga yang ada (LPMD) bisa saja tidak berhasil karena tidak adanya arahan dari fasilitator atau instansi yang berwenang. Jika dibandingkan dengan program pemberian kartu nelayan di

kecamatan koto tengah ternyata program ini bisa dianggap efektif karena program ini disosialisasikan langsung oleh instansi terkait/DKP Kota Padang. Hanya saja kendalanya justru nelayan yang tidak sempat hadir karena sibuk melaut.

b. Sosialisasi program

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi. Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan atau pemasyarakatan dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan, dan bertindak, dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi social yang efektif. Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktifitas yang ditunjukkan untuk memberitahukan membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan itu. Sosialisasi dialami oleh individu sebagai makhluk social sepanjang kehidupan sejak ia lahir hingga meninggal dunia, sosialisasi dibagi menjadi dua: (1) sosialisasi primer(dalam kehidupan), dan (2) sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga), sedangkan sekunder adalah suatu sosialisasi lanjutan setelah primer yang mengenalkan individu kedalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto, proses pelaksanaan program dimulai dari tahap pelatihan dan penyuluhan, pengembangan dan penyebarluasan serta evaluasi program. Dengan adanya sosialisasi kewirausahaan dan tata cara penerimaan bantuan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat miskin yang

mendapatkan bantuan agar dapat memotivasi mereka dalam mengembangkan kemampuan yang mereka miliki serta dapat meningkatkan mutu dan taraf hidup keluarga mereka.

Pada penelitian yang gagal yang diteliti oleh Muslim, yaitu pendekatan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang sengaja menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya, dalam sosialisasi program tersebut adalah mengenai kegiatan ternak bergilir, pelatihan ternak sapi, pelatihan menjahit, pelatihan budidaya ikan, dan pelatihan memasak. Dalam hal ini yang menjadi peserta adalah masyarakat yang sudah memiliki latar belakang seperti itu. Dalam pemilihan peserta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut, tidaklah orang yang benar-benar tidak memahami masalah yang akan disosialisasikan, sehingga yang sudah mahir di bidangnya menjadi lebih ahli lagi, dan yang tidak memiliki latar belakang, semakin tidak memahami sama sekali.

c. Tujuan program

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu: (1) program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program, (2) program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga didefinisikan melalui anggaran, (3) program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh public. Dalam pembuatan sebuah program maka pasti memiliki tujuan dari sebuah program tersebut adalah untuk pembangunan social, sebagaimana pembangunan social sebagai salah satu pendekatan pada awal perkembangan seringkali dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi. Hal ini terkait

dengan pemahaman banyak orang yang menggunakan istilah pembangunan yang dikonotasikan sebagai perubahan ekonomi yang diakibatkan industrialisasi.

Tujuan program merupakan hal pokok dan memegang peran nyata dalam setiap kebijakan dikeluarkan, dimana untuk mencapai sebuah kebijakan tentu harus ada tujuan untuk kearah mana kebijakan program itu akan diarahkan, menyangkut dengan kepentingan masyarakat khususnya nelayan yang memiliki keterbelakangan perekonomian agar kebijakan mengenai kartu nelayan ini menjadi sebuah instrument penunjang untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat untuk merubah pola pikir menuju kearah yang lebih baik lagi, dan mengangkat mereka dari keterpurukan perekonomian yang selalu kekurangan dan berada di dalam zona kesederhanaan, dengan adanya kebijakan program maka mereka menjadi prioritas untuk diperhatikan.

d. Pemantauan program

Proses dasar dalam pemantauan program atau monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) pengukuran pelaksanaan; (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu: (a) ketaatan (compliance), monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standard an prosedur yang telah ditetapkan. (b) pemeriksaan (auditing), monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka. (c) laporan (accounting), monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan social dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan sesudah periode waktu tertentu. (d) penjelasan (*explanation*), monitoring menghasilkan

informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijakan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Setiap pelaksanaan program yang dikatakan berhasil selalu dilakukan pemantauan program. Tahap pemantauan ini sangat penting karena dapat menentukan berhasil tidaknya program tersebut, sehingga dapat dijadikan landasan berjalannya suatu program. Kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum beralih ke tahap pelaksanaan sudah berjalan dengan baik.

Pemantauan program yang gagal disebabkan karena buruknya kinerja fasilitator yang bekerja mengedepankan hasil daripada proses dan tidak menjalankan tugas, dan fungsinya dengan baik.

KESIMPULAN

Efektivitas pelaksanaan kartu nelayan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan belum bisa dikatakan efektif. Karena nilai plus dari kebijakan program tersebut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa masyarakat belum berani menggunakan sertifikat tanah mereka untuk menjadi jaminan pinjaman uang di bank, dengan alasan mereka takut tidak bisa membayar angsuran kredit di bank.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik karena bimbingan dari Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D kemudian kritik dan saran yang diberikan oleh Ibu Dra. Jumiati M.Si dan Bapak Drs. Karjuni Dt Maani M.Si

DAFTAR PUSTAKA

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan*

Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Graha Media.

Pasolong, Habani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksana.

Karjuni Dt. Maani. 2011. "Teori ACTORS Dalam Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Demokrasi*, Vol.X No.1 Th.2011.

Kerniawan, Bambang, Hanafi. "Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi"(Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik(JAP)*, Vol. 1, No.4. Hal 9-14.

Fadilah. 2017. "*Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan Premi Asuransi di Kabupaten Gunung Kidul*". Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Unuversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Fatonah. 2015. "*Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan*". Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Nisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Derianto, Naldi, Erawati. 2015. "*Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang*". Skripsi STKIP PGRI Sumatra Barat.

Widuri, Maesaroh. "*Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Semarang*" Skripsi Universitas Diponegoro.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

16/PERMEN-KP/2016 Tentang Kartu Nelayan.

BIOGRAFI PENULIS



SUHARI YANTO

Lahir di Pujarahayu, 04 Agustus 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD N 03 Pujarahayu, dilanjutkan MTsM Muhamadiyah Simpang Tiga Opher, melanjutkan pendidikan SMK N 1 Sasak Ranah Pasisie, hingga akhirnya menempuh masa perkuliahan di Uniferitas Negeri Padang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara.